

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.

Undang Undang No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang bersifat otonom sebagai refleksi dari pelaksanaan asas desentralisasi di bidang pemerintahan. Undang No. 32 Tahun 2004 kemudian direvisi kembali menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintahan yang bersifat otonom didefinisikan sebagai pemberian wewenang yang menimbulkan kewajiban bagi daerah untuk mengelola urusan rumah tangga sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan utama dari otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian demi meminimalisir tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Selain itu, tujuan otonomi daerah diharapkan mampu menambah kekuatan fiskal daerah melalui program andalan daerah dalam menggali serta mengelola potensi daerah sehingga diharapkan mampu mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam hal kemampuan keuangan.

Berdasarkan tujuan otonomi daerah tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tidak hanya pelimpahan wewenang berupa pembagian sumber pendapatan bagi daerah untuk mendukung serta melaksanakan pelayanan dalam kebutuhan publik. Namun Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 memberikan kesempatan yang diharapkan dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah serta masyarakat untuk mengembangkan perekonomian daerah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Usaha dalam mengembangkan perekonomian sesuai dengan tujuan adanya otonomi daerah yang diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 memerlukan pertimbangan dari berbagai komponen. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen yang dapat digunakan untuk mengetahui kualitas otonomi daerah yang sedang berjalan pada suatu daerah.

Pendapatan asli daerah dapat menjadi refleksi atas kualitas otonomi daerah dikarenakan urgensi pendapatan asli daerah sebagai tujuan bagi setiap pemerintah daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah dapat meminimalisir ketergantungan daerah terhadap dana alokasi umum serta dana alokasi khusus. Berikut ini adalah data pendapatan asli daerah pada Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan :

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2010-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah
2010	Rp 7.275.089.493.848
2011	Rp 8.898.616.683.297
2012	Rp 9.584.081.971.227
2013	Rp 11.579.340.719.022
2014	Rp 14.442.216.534.959
2015	Rp 15.402.647.674.503
2016	Rp 15.817.795.024.797
2017	Rp 17.324.177.664.424
2018	Rp 18.531.062.021.823
2019	Rp 19.327.125.485.406

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2020)

Potensi setiap daerah yang beraneka ragam menimbulkan tingkat pendapatan asli daerah yang berbeda pula. Otonomi daerah memang memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola sendiri potensi daerah yang dimiliki. Namun karena setiap daerah memiliki keunikan serta keragaman potensi, tentu diperlukan perlakuan yang berbeda pula dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Berdasarkan PMK.06/PMK.07/2012, sumber keuangan yang menjadi penopang dalam menjalankan pemerintahan selaku daerah otonom adalah dana transfer dari pemerintah pusat. Transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan rangkaian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal.

Dana perimbangan sebagai salah satu komponen dalam transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Berikut ini adalah data dana perimbangan pada Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan :

Tabel 1.2 Dana Perimbangan Provinsi Jawa Timur 2010-2019

Tahun	Dana Perimbangan	
2010	Rp	2.445.304.862.332
2011	Rp	2.528.086.449.989
2012	Rp	3.069.016.101.831
2013	Rp	2.773.894.813.266
2014	Rp	3.485.336.767.166
2015	Rp	3.115.619.118.152
2016	Rp	9.039.003.358.881
2017	Rp	12.494.048.645.633
2018	Rp	13.295.784.849.272
2019	Rp	13.941.687.209.995

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2020)

Eksistensi pendapatan asli daerah sebagai *input* yang diperoleh daerah serta dana perimbangan sebagai transfer dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan atas kebutuhan publik. Guna menunjang keberlanjutan pelayanan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik diperlukan infrastruktur dan sarana prasarana yang memadai. Pengadaan infrastruktur dan sarana prasarana merupakan komponen dari belanja modal. Berikut ini adalah data belanja modal pada Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019 yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan :

Tabel 1.3 Belanja Modal Provinsi Jawa Timur 2010-2019

Tahun	Belanja Modal	
2010	Rp	877.876.929.850
2011	Rp	1.045.361.914.200
2012	Rp	1.057.365.183.809
2013	Rp	1.175.751.046.134
2014	Rp	1.207.456.633.374
2015	Rp	2.258.320.071.662
2016	Rp	2.150.594.111.043
2017	Rp	3.090.055.683.753
2018	Rp	2.840.552.249.709
2019	Rp	2.770.973.973.023

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2020)

Pengelolaan daerah guna menunjang perolehan pendapatan asli daerah yang maksimal, stimulus dana perimbangan sebagai inovasi guna meminimalisir ketimpangan ekonomi antar daerah, serta belanja modal sebagai *output* dari adanya *input* berupa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki kesamaan tujuan walaupun proses dalam perolehannya berbeda-beda. Baik pendapatan asli daerah, dana perimbangan, ataupun belanja modal diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, kuantitas serta fluktuasi pada laju pertumbuhan kabupaten/kota akan sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Timur. Berikut ini adalah data pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur:

Tabel 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur 2010-2019

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2010	6,68 %
2011	7,22 %
2012	7,27 %
2013	6,55 %
2014	5,86 %
2015	5,44 %
2016	5,58 %
2017	5,45 %
2018	5,50 %
2019	5,52 %

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (2020)

Melalui informasi di atas, penulis mengangkat sebuah penelitian dengan judul: ***“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening pada Provinsi Jawa Timur.”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh terhadap belanja modal pada Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019?
2. Apakah dana perimbangan mempunyai pengaruh terhadap belanja modal pada Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019?
3. Apakah belanja modal mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019?
4. Apakah pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019?

5. Apakah dana perimbangan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019?
6. Apakah belanja modal memediasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019?
7. Apakah belanja modal memediasi pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun target yang ingin dicapai sesuai rumusan masalah yaitu untuk menganalisa:

1. Pengaruh langsung pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019.
2. Pengaruh langsung dana perimbangan terhadap belanja modal pada Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019.
3. Pengaruh langsung belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019.
4. Pengaruh langsung pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019.
5. Pengaruh langsung dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019.
6. Pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal pada Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019.
7. Pengaruh tidak langsung dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal pada Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, maka penelitian ini dilakukan untuk memiliki manfaat kegunaan yaitu :

a. Penulis

Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap ilmu-ilmu yang telah penulis dapatkan dan menambah pengetahuan penulis terhadap besaran pendapatan

asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2019.

b. Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan sumber dana beserta komponen lain yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi.

c. Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi pembaca dan menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya.